ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Pemberian Bantuan Dana Program Keluarga Harapan Desa Matas Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim Ditinjau Dari Asas-asas Hukum Ekonomi Syariah. judul tersebut dipilih karena belum meratanya penerima bantuan PKH, dan setiap tahunnya mengalami penambahan keluarga penerima manfaat (KPM), dengan adanya PKH keluarga miskin di Desa Matas Kecamatan Tanjung Agung tidak berkurang namun bertambah. terdapat 2 rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu: 1. Bagaimana kriteria pemberian bantuan dana program keluarga harapan (PKH) Desa Matas Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim? 2. Bagaimana Perspektif Asas-asas Hukum Ekonomi Syariah terhadap pemberian bantuan dana Program Keluarga Harapan (PKH) Desa Matas Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim?. Metode penelitiannya menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu difokuskan pada lapangan (*field research*) dengan metode wawancara yang sifatnya diskriptif, serta melibatkan pengamatan langsung dan interaksi dengan subjek penelitian dalam lingkungan alami. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: *pertama*, Kriteria yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2018 yaitu ibu hamil/nifas, anak usia dini/balita, anak usia sekolah (SD/SMP/SMA), lansia, dan disabilitas berat. Penerima bantuan dana PKH di Desa Matas belum sesuai dengan ketentuan. sementara terdapat keluarga miskin yang layak menerima bantuan tidak terdata. *Kedua*, jika ditinjau dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Matas sudah melaksanakan beberapa prinsip Hukum Ekonomi Syariah seperti tolong-menolong dan tanggung jawab. Namun, untuk memenuhi seluruh prinsip Hukum Ekonomi Syariah, terutama keadilan, perlu adanya peningkatan dalam pendataan, verifikasi karena bantuan belum merata. dengan itu, bantuan PKH di Desa Matas dapat lebih adil, tepat sasaran, dan sesuai dengan tujuan syariah untuk mewujudkan kesejahteraan yang berkelanjutan bagi masyarakat miskin.

Kata kunci : Bantuan Dana, PKH, Asas-asas Hukum Ekonomi Syariah.